

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar belakang

Kebutuhan akan audit independen muncul ketika hadirnya pasar modal, dimana perusahaan dapat meningkatkan investasi modal yang dibutuhkan untuk membiayai perluasan usahanya. Pasar modal memungkinkan perusahaan publik untuk menjual sebagian kecil dari kepemilikan (seperti saham) atau untuk memecah dana pinjaman ke pinjaman-pinjaman kecil (seperti obligasi) sehingga sejumlah besar modal dapat dihasilkan dari berbagai sumber investor dan kreditor.

Perusahaan publik adalah perusahaan yang menjual saham atau obligasinya kepada publik, memberikan kepada publik kepentingan yang nyata dalam penggunaan yang tepat, hak pengelolaan atas sumber daya perusahaan. Oleh karena itu, pertumbuhan korporasi modern akan menuju kelaziman atas ketidakhadiran pemilik (pemegang saham) dan penggunaan manajer profesional yang menjalankan roda operasi perusahaan sehari-hari.

Dengan dasar ini maka manajer bertindak sebagai agen (*agent*), bagi pemilik perusahaan dianggap sebagai prinsipal (*principal*). Pengetahuan atau perolehan informasi antara manajer dan pemilik tidak selamanya akan selaras dalam pemahamannya tetapi sering berakhir dengan asimetris informasi antara kedua belah pihak. Informasi asimetris berarti bahwa manajer secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan hasil operasi entitas dari pada pemilik yang tidak ditempat (*absentee owner*).

Tujuan kedua belah pihak mungkin tidak sama, akan terdapat konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang alami antara manajer dan pemilik yang tidak hadir. Jika kedua pihak berusaha memaksimalkan kepentingan mereka sendiri, manajer tidak akan selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Oleh karena itu, peran informasi akuntansi yang dilandasi prinsip akuntansi yang disetujui adalah untuk menjadikan manajer bertanggung-jawab (*accountable*) kepada pemilik perusahaan. Sudah tentu, akuntansi tidak memecahkan masalah dengan sendirinya.

Karena manajer bertanggung jawab untuk melaporkan hasil dari tindakannya sendiri, dimana pemilik tidak dapat langsung mengawasi maka memungkinkan manajer akan melakukan manipulasi laporan. Pemilik mengantisipasi kemungkinan terjadinya manipulasi laporan oleh manajer dengan menunjuk auditor independen (akuntan publik) untuk memeriksa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen.

Manajemen berusaha dan berharap laporan keuangan yang diperiksa oleh Akuntan Publik yang independen mendapatkan opini yang terbaik yaitu wajar tanpa pengecualian, sedangkan pemilik (pemegang saham) mengharapkan perusahaan diperiksa dengan teliti oleh auditor independen yang memiliki integritas yang tinggi, dan pemilik mengharapkan kepemilikan atas harta yang ada di perusahaan tidak berkurang dan jika mungkin meningkat.

Sikap profesional auditor seharusnya dalam mengaudit perusahaan tidak boleh mengesampingkan sikap profesionalnya, auditor harus menjaga independensinya, kompetensi dan objektivitasnya dalam melaksanakan tugas audit. Begitu auditor sudah menanda tangani kontrak audit, auditor harus sudah tidak berfikir berapa

pembayaran atau fee audit, tetapi lebih berkonsentrasi pada menjaga sikap sebagai auditor independen.

Keyakinan auditor atas laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen harus didasari atas bukti-bukti yang memadai. Auditor dituntut untuk menjaga profesionalitasnya, mungkin saja manajemen merekayasa bukti yang seolah-olah valid, dalam kondisi seperti ini auditor harus menggunakan kemampuannya untuk dapat mendeteksi dan berfikir kritis.

Dalam Tuanakotta (IAI, SA seksi 230.08) menyatakan bahwa:

“Auditor tidak menganggap bahwa manajemen adalah tidak jujur, namun juga tidak menganggap bahwa kejujuran manajemen tidak dipertanyakan lagi”.

Auditing atau pemeriksaan umumnya dimaknai sebagai tahap mencari kesalahan atau kelemahan dari suatu hal yang telah dilakukan, tetapi sebenarnya audit adalah pekerjaan jasa profesional independen yang tujuannya meningkatkan kualitas informasi sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Agar audit dapat dilakukan, harus tersedia informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan beberapa standar (kriteria) yang dapat digunakan pemeriksa untuk mengevaluasi informasi tersebut .

Menurut Konrath (2002:5) dalam Sukrisno

definisi auditing adalah suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam memberi ciri ilmiah pada auditing Mautz dan Sharaf (Tuanakotta, 2011) menekankan postulat ini sebagai landasan berfikir dan menarik kesimpulan. Beberapa postulat tentang auditing.

Laporan dan data keuangan dapat diperiksa (are verifiable), tidak ada benturan kepentingan, tidak ada persekongkolan, adanya sistem pengendalian intern, penerapan prinsip akuntansi yang konsisten, dan profesionalitas auditor.

Menurut Messier (2006) detail konseptual dan prosedural dari audit laporan keuangan membangun tiga konsep mendasar : risiko audit, materialitas, dan bukti yang berkaitan dengan asersi manajemen. Penentuan risiko audit yang akan dilaksanakan (disebut dengan lingkup audit). Dalam menetapkan lingkup audit, auditor harus membuat keputusan mengenai sifat, saat, dan luas bukti yang akan dikumpulkan dalam rangka mengevaluasi asersi manajemen.

Konsep penting yang pertama yang terlibat dalam audit adalah risiko audit (*audit risk*) yang artinya bahwa auditor mungkin tanpa sepengatahuannya gagal untuk memodifikasi secara benar pendapatnya atas laporan keuangan dengan salah saji yang material .

Konsep penting yang kedua yang terlibat dalam audit adalah materialitas.

Pertimbangan auditor atas materialitas adalah pertimbangan profesional (*professional judgment*) dan terpengaruh oleh apa yang dirasakan auditor sebagai pandangan orang yang bergantung pada laporan keuangan .

Konsep penting ketiga dalam audit adalah bukti mengenai asersi manajemen.

Kebanyakan pekerjaan auditor dalam mencapai pendapat atas laporan keuangan terdiri atas mendapatkan dan mengevaluasi bukti.

Dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti, auditor berkepentingan dengan relevansi dan keandalan bukti. Relevansi mengacu kepada apakah bukti yang

berhubungan dengan asersi manajemen yang spesifik telah diuji. Keandalan mengacu pada pengdiagnosisan bukti

Dalam Tuankotta, 2011 hal 54, konsep-konsep dalam auditing, Mautz dan Sharaf mengembangkan beberapa konsep yang mereka pandang sebagai konsep utama dalam auditing, yaitu *evidence*, *due audit care*, *fair presentation*, *independence*, dan *ethical conduct*. Secara umum ada tiga jenis *evidence* atau bukti, yakni *natural evidence*, *created evidence*, dan *rational argumentation*.

Natural evidence adalah bukti yang paling meyakinkan seperti ketika auditor mengamati persediaan di gudang, auditor yakin persediaan itu eksis.

Created evidence merupakan bukti yang diciptakan, misalnya faktur penjualan, catatan piutang, bukti tersebut merupakan bukti yang harus dibuktikan kebenarannya oleh auditor, untuk faktur penjualan auditor harus mencocokkan dengan bukti penerimaan kas atau melakukan konfirmasi atas piutang.

Rational argumentation misalnya auditor menemukan transaksi yang tidak wajar, tetapi setelah diteliti lebih dalam lagi, auditor memperoleh "*rational argumentation*" atas ketidak wajarannya suatu transaksi bisa terjadi.

Evidence atau bukti memberikan kepada auditor cara untuk mencapai keyakinan melalui "mengetahui (*knowing*), dan bukan sekedar "mempercayai" (*believing*). "Pengetahuan" ini merupakan kunci menuju "kebenaran" (*truth*), dan kebenaran disini diartikan sebagai "sesuai dengan kenyataan".

Dalam audit banyak hal penting yang harus diperhatikan, selain auditor harus memiliki sikap skeptisisme profesional, dan kompetensi yang harus dimiliki auditor dalam pelaksanaan audit, auditor dalam menjalankan tugas auditnya harus mentaati etika profesi, juga ada hal lain yang tidak kalah pentingnya yaitu materialitas. Dewan Standar Akuntansi Keuangan mendefinisikan materialitas (*materiality*) adalah tingkat penghapusan atau salah saji informasi akuntansi yang

dalam hubungannya dengan kondisi sekitarnya, memungkinkan bahwa pertimbangan seseorang yang mengandalkan informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh dengan penghapusan atau salah saji tersebut.

Dalam Tuanakotta hal 194, 2011 menjelaskan, ada dua ekspektasi masyarakat atau publik terhadap auditor, yakni dialah yang pertama-tama harus: dapat mengetahui jika perusahaan akan mengalami gagal bisnis (*business failure*), karenanya auditor diharapkan berada dalam posisi untuk mengingatkan masyarakat mengenai potensi gagal bisnis; Kedua diharapkan dapat mendeteksi *fraud* yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan kliennya, karyawan kliennya, dan pihak ketiga yang bertransaksi dengan kliennya.

Ekspektasi pertama berkenaan dengan gagal bisnis yang tidak berhubungan dengan *fraud*. Dalam audit, seorang auditor tidak memberikan pendapat tentang Dalam Tuanakotta hal 194, 2011 menjelaskan, ada dua ekspektasi masyarakat atau publik terhadap auditor, yakni dialah yang pertama-tama harus: dapat mengetahui jika perusahaan akan mengalami gagal bisnis (*business failure*), karenanya auditor diharapkan berada dalam posisi untuk mengingatkan masyarakat mengenai potensi gagal bisnis; Kedua diharapkan dapat mendeteksi *fraud* yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan kliennya, karyawan kliennya, dan pihak ketiga yang bertransaksi dengan kliennya.

prospek bisnis meskipun memiliki pengetahuan umum tentang hal tersebut.

Disinilah timbul kesenjangan antara apa yang menjadi ekspektasi masyarakat dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab auditor. Ekspektasi yang pertama tidak menimbulkan masalah dalam litigasi di pengadilan, namun pemberitaan di media elektronik dan media cetak yang mengkaitkan perusahaan yang gagal bisnis dengan nama kantor akuntan publiknya, jelas merugikan bagi auditor yang reputasinya dipertanyakan.

Pelajaran dari ekspektasi pertama adalah bahwa auditor berupaya tidak mengasosiasikan namanya dengan publikasi yang bersifat promosional, misalnya dalam IPO (*initial public offering*) suatu saham. Promosi besar-besaran tentang saham yang akan diluncurkan sering meningkatkan ekspektasi publik tentang keuntungan yang bakal diraihinya. Dan ketika harapan ini pupus, publik kecewa dan mencari kambing hitam yang dapat menutup kerugian.

Ekspektasi kedua berkenaan dengan terjadinya *fraud*. Umumnya auditor mendapat kecaman berkenaan rekayasa laporan keuangan yang dilakukan klien. Salah saji (*misstatement*), baik yang tanpa sepengetahuan auditor, atau dengan sepengetahuannya, apalagi salah saji yang ‘direstuinya’, akan menyudutkan auditor. Masyarakat melihat auditor sebagai ahli yang seharusnya mampu mendeteksi *fraud*, apalagi kalau jumlahnya material. Oleh karena itu, dalam menghadapi jenis kesenjangan ekspektasi kedua, pembelaan dari segi hukum adalah (sekurang-kurangnya) bahwa ia sudah memenuhi standar audit yang ditetapkan profesi atau otoritas yang bersangkutan (misalnya otoritas pasar modal, otoritas pasar uang, Badan Pemeriksa Keuangan, dan lain-lain).

Auditor juga harus dapat membuktikan bahwa ia telah menemukan indikasi terjadinya *fraud* atau *fraud indicia*, dan sudah melaporkan *fraud indicia* tersebut. Hal ini dibuktikan dengan (a) kertas kerja audit mendokumentasikan pertemuan dengan klien mengenai *fraud indicia* tersebut dan (b) surat yang dikirimkan auditor kepada kliennya (*management letter*) yang berisi temuan-temuan mengenai *fraud indicia* itu direkomendasi auditor.

Dalam kedua kesenjangan ekspektasi, reputasi auditor dan kantor akuntan publiknya menjadi pertaruhan. Dalam semua kasus audit, reputasi adalah segala-galanya. Arthur Andersen dengan kasus seperti Enron, menunjukkan bahwa merosotnya reputasi diikuti dengan pindahnya klien ke kantor akuntan publik lain, keluarnya staff dan partner, dan hancurnya operasional global. Oleh karena itu, pencegahan terhadap gagal audit (*audit failure*) merupakan kunci utama dalam mempertahankan reputasi.

Reputasi kantor akuntan publik sangat dipengaruhi oleh kualitas auditornya terutama sikap profesionalisme auditor, auditor harus memiliki sikap skeptis dalam menjalankan tugas auditnya.

Dalam Tuanakotta, hal 77, 2011, salah satu penyebab gagal audit (*audit failure*) adalah rendahnya skeptisisme profesional (*professional scepticism*). Skeptisisme profesional yang rendah menumpulkan kepekaan auditor terhadap kecurangan baik yang nyata maupun yang berupa potensi, atau terhadap tanda-tanda bahaya (*red flags, warning signs*) yang mengindikasikan adanya kesalahan (*accounting error*) dan kecurangan (*fraud*).

Skeptisisme profesional merupakan suatu sikap yang harus dimiliki auditor, ada beberapa peneliti yang meneliti tentang skeptis, salah satu diantaranya adalah Suzy Noviyanti (2008).

Dalam penelitiannya juga menyebutkan peneliti lain yaitu Suraida (2005) yang melakukan penelitian dengan metode survey terhadap akuntan publik di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa etika, kompetensi, pengalaman audit, dan resiko audit mempengaruhi skeptisisme profesional auditor

baik secara parsial maupun secara simultan. Selain itu etika, kompetensi, pengalaman audit, resiko audit, dan skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini.

Dalam disertasinya Dr. Suzy Noviyanti mencoba melihat keeratan hubungan variabel *trust* (tingkat kepercayaan) auditor terhadap klien, *fraud risk assessment* (penaksiran risiko kecurangan) dan karakteristik personal dengan skeptisisme profesional. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa skeptisisme profesional auditor dipengaruhi oleh penaksiran risiko kecurangan yang diberikan oleh atasannya. Auditor yang diberi penaksiran risiko kecurangan tinggi secara signifikan lebih skeptis dibandingkan dengan auditor yang tidak diberi penaksiran risiko kecurangan dan secara signifikan lebih skeptis dibandingkan dengan auditor yang diberi penaksiran risiko kecurangan lebih rendah.

Auditor yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kliennya akan berakibat menurunnya tingkat skeptisisme profesional auditor.

Selain masalah skeptisisme profesional auditor ada yang sama pentingnya yang harus dilakukan auditor dalam melaksanakan audit, yaitu pertimbangan tingkat materialitas. Pertimbangan tingkat materialitas ini berkaitan erat dengan opini audit, berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul:

“Pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor, Kompetensi Auditor, Dan Etika Profesi Akuntan Publik Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Pelaksanaan Audit”

Dalam kedua kesenjangan ekspektasi, reputasi auditor dan kantor akuntan publiknya menjadi pertaruhan. Dalam semua kasus audit, reputasi adalah segala-galanya. Arthur Andersen dengan kasus seperti Enron, menunjukkan bahwa merosotnya reputasi diikuti dengan pindahnya klien ke kantor akuntan publik lain, keluarnya staff dan partner, dan hancurnya operasional global. Oleh karena itu, pencegahan terhadap gagal audit (*audit failure*) merupakan kunci utama dalam mempertahankan reputasi.

Reputasi kantor akuntan publik sangat dipengaruhi oleh kualitas auditornya terutama sikap profesionalisme auditor, auditor harus memiliki sikap skeptis dalam menjalankan tugas auditnya.

Dalam Tuanakotta, hal 77, 2011, salah satu penyebab gagal audit (*audit failure*) adalah rendahnya skeptisisme profesional (*professional scepticism*). Skeptisisme profesional yang rendah menumpulkan kepekaan auditor terhadap kecurangan baik yang nyata maupun yang berupa potensi, atau terhadap tanda-tanda bahaya (*red flags, warning signs*) yang mengindikasikan adanya kesalahan (*accounting error*) dan kecurangan (*fraud*).

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah:

- Apakah skeptisisme profesional auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pelaksanaan audit.
- Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pelaksanaan audit.

- Apakah etika profesi auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pelaksanaan audit.
- Apakah skeptisisme profesional auditor, kompetensi auditor, dan etika profesi auditor secara simultan berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pelaksanaan audit.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh skeptisisme auditor, kompetensi auditor, dan etika profesi terhadap tingkat pertimbangan materialitas dalam pelaksanaan audit baik secara parsial maupun secara simultan.

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan bidang ilmu auditing.